

---

---

## DEMOKRASI DELIBERATIF HABERMAS DAN PROBLEMATIKA IDEOLOGI DI RUANG PUBLIK DIGITAL

Silfanus Jemadin<sup>1\*</sup>, Ando Tahamin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia

\*e-mail: [vanojemadin788@gmail.com](mailto:vanojemadin788@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi ruang publik dan praktik demokrasi kontemporer secara signifikan. Media sosial dan platform digital menyediakan ruang baru bagi partisipasi politik yang lebih luas, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius bagi demokrasi deliberatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika ideologi di ruang publik digital serta implikasinya terhadap kualitas deliberasi demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kritis wacana terhadap literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa polarisasi ideologis, fenomena *echo chamber*, emosionalisasi diskursus politik, penyebaran disinformasi, dan ketimpangan kuasa digital telah melemahkan rasionalitas komunikatif yang menjadi fondasi demokrasi deliberatif. Hasil temuan artikel ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital, etika diskursus publik, dan tata kelola platform digital sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi deliberatif di era digital.

**Kata kunci:** *Demokrasi Deliberatif, Ideologi, Ruang Publik, Media Sosial.*

### Abstract

*The development of digital technology has significantly transformed public spaces and contemporary democratic practices. Social media and digital platforms provide new spaces for broader political participation, but at the same time pose serious challenges to deliberative democracy. This article aims to analyze the problems of ideology in digital public spaces and their implications for the quality of democratic deliberation. This research uses a qualitative approach with a literature study method and critical discourse analysis of relevant academic literature. The results of the study show that ideological polarization, the echo chamber phenomenon, the emotionalization of political discourse, the spread of disinformation, and digital power imbalances have weakened the communicative rationality that is the foundation of deliberative democracy. The findings of this article emphasize the importance of strengthening digital literacy, public discourse ethics, and digital platform governance as efforts to maintain the quality of deliberative democracy in the digital era.*

**Key words:** *Deliberative Democracy; Ideology; Public Space; SocialMedia.*

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem ketatanegaraan yang dalamnya diskursus publik atau masyarakat memainkan peran penting. Hal ini terjadi karena masyarakat merupakan obyek sekaligus subjek utama dalam demokrasi. Dalam demokrasi, setiap keputusan diambil berdasarkan sistem elektoral yang berlaku. Akan tetapi dalam masyarakat modern, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh kualitas diskursus publik yang menjadi landasan pengambilan keputusan politik. Dalam perspektif demokrasi deliberatif Jurgen Habermas, legitimasi politik diperoleh melalui proses komunikasi rasional yang melibatkan partisipasi antar warga negara. Habermas, dalam hal ini, keputusan politik dianggap sah bukan semata-mata karena didukung oleh suara mayoritas, melainkan karena dihasilkan melalui proses dialog rasional, inklusif, dan reflektif antar warga negara. Paham ini hampir pasti menegaskan bahwa ruang publik merupakan kunci dan arena strategis dalam pembentukan opini dan kehendak kolektif (Lewar & Madung, 2022).

Dalam perkembangan demokrasi modern, karakter ruang publik secara fundamental mengalami perubahan. Ruang publik yang dulunya terbatas dalam ranah fisik, namun sekarang mengalami transformasi ke dalam ruang digital, seperti: *Youtube*, *Televisi*, *Instagram*, *Tiktok*, *Facebook*, dan *Twiter*. Transformasi ini memungkinkan adanya partisipasi warga negara secara langsung dalam ruang demokrasi. Perubahan ini terjadi karena pengaruh perkembangan teknologi digital. Dalam perkembangan teknologi digital, media sosial memungkinkan individu untuk berpartisipasi langsung dalam diskursus politik tanpa perantaraan orang lain maupun juga institusi media tradisional. Perkembangan teknologi digital awalnya dilihat sebagai medium demokratis yang dapat memperkuat deliberasi publik (Dahlberg, 2001).

Namun, transformasi ini juga membawa tantangan baru, seperti polarisasi dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Akan tetapi, transformasi ini juga membawa tantangan baru dalam demokrasi modern, seperti polarisasi dan penyebaran informasi tanpa verifikasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ruang publik digital menjadi medium skandal baru dalam demokrasi. Dalam ruang digital, konflik ideologi, polarisasi ekstrem, serta penyebaran disinformasi menjadi model skandal baru yang memungkinkan demokrasi tidak berjalan dengan baik (Amri & Yandri, 2025).

Ideologi politik dalam ruang digital sering kali tampil dalam bentuk yang disederhanakan dan emosional. Alih-alih menjadi objek perdebatan rasional, dalam ruang digital ideologi berfungsi sebagai identitas politik tanpa eksklusif. Kondisi ini menjadi sumber tantangan serius bagi demokrasi deliberatif yang mensyaratkan

keterbukaan terhadap perbedaan dan pertukaran argumen. Diskursus ruang publik dalam dunia digital menjadi peluang sekaligus ancaman bagi demokrasi (Fatimah, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas teori deliberati Jurgen Habermas dalam berbagai bidang, seperti, politik, demokrasi, komunikasi, dan ruang publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Muthhar, 2016) membahas demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam politik Indonesia, dan hasil temuannya adalah kekuasaan komunikatif terbentuk lewat pengakuan faktual atas klaim-klaim kesahihan yang terbuka terhadap kritik dan dicapai secara diskursif. Kemudian ruang publik juga bertujuan untuk membentuk opini dan kehendak yang mengandung kemungkinan generalisasi, yaitu mewakili kepentingan umum. Karena itu, negara dibentuk berdasarkan kedaulatan rakyat apabila negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik. Lewat konsep ini, persoalan selam ini yang terjadi di antara para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pelaku pers, peneliti, intelektual, gerakan mahasiswa benar-benar harus menjembatani komunikasi politis (Prasetyo, 2012)

Penelitian yang dilakukan oleh (Nino, 2024) membahas demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam koteks demokrasi Indonesia. Demokrasi deliberatif Habermas merupakan interaksi antara pemerintah dan rakyat dalam membuat kebijakan tertentu. Hasil temuannya adalah: pertama, demokrasi deliberatif memiliki implikasi positif bagi demokrasi Pancasila; kedua, demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan yang harus dipertahankan oleh negara Indonesia sendiri.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh (Haliim, 2018) membahas negara sebagai legal order (tatanan hukum) yang juga merupakan tatanan sosial (social order). Dalam tatanan hukum, negara bertugas sebagai organisasi yang melakukan tindakan-tindakan koersif guna mencapai tujuan negara tersebut. Sedangkan tatanan sosial merupakan serangkaian institusi dan kultur manusia yang saling berkaitan. Karena itu, tujuan demokrasi deliberatif adalah adanya pemeriksaan langsung oleh warganegara, terhadap jalanya roda pemerintahan yang sesuai dengan kehendak umum.

Beberapa penelitian di atas telah mengulas konsep demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam berbagai bidang, selain ada kesamaan dalam metode penulisan dan hal lainnya, tetapi dalam tulisan ini masih ada gab yang cukup besar yang perlu dianalisis dan diurai kembali mengenai teori demokrasi deliberatif Habermas dalam konteks diskursus publik di ruang digital. Karena itu, kebaruan dalam tulisan ini adalah penulis berusaha menghubungkan teori demokrasi deliberatif dalam konteks problematika Ideologi di Ruang Publik. Berdasar hal ini, dalam tulisan ini penulis berusaha

mengkaji problematika ideologi di ruang publik digital dan implikasinya terhadap praktik demokrasi deliberatif. Untuk mengulas ini, pertanyaan mendasar yang menjadi alasan pengkajian dalam artikel ini adalah bagaimana ideologi dalam ruang publik digital mempengaruhi praktik demokrasi deliberatif?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Fadli, 2019). Data dikumpulkan dengan menganalisis konsep demokrasi deliberatif Habermas dan literatur lain yang membahas ideologi di ruang publik digital. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber dokumenter yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait masalah-masalah ideologi politik dalam terang pemikiran demokrasi deliberatif Habermas. Data diperoleh dari buku-buku, artikel, opini, jurnal, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik demokrasi deliberatif, ideologi, dan ruang publik digital. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi pola utama dalam literatur, serta analisis kritis wacana untuk memahami bagaimana ideologi reproduksi dalam diskursus publik digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Apa itu Demokrasi Deliberatif?**

Salah satu karya Jurgen Habermas yang membahas demokrasi deliberatif ialah *Faktizitas und Geltung*, terjemahan dalam bahasa Inggris: *Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Secara umum, dalam buku ini Habermas menekankan bahwa “negara hukum tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan tanpa demokrasi radikal” (Habermas, 1996). Baginya, dalam negara demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup, melainkan warganegara berkontribusi dalam pembentukan setiap kebijakan politik hukum. Partisipasi demikian dapat melalui media atau organisasi-organisasi tertentu. Medan publik menjadi arena di mana perundangan dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif (Gimmler, 2001).

Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Secara leksikal kosakata ini mengandung nilai politis yaitu “musyawarah”. Karena itu, arti leksikal ini harus ditempatkan dalam

konteks “publik” atau “kebersamaan secara politis” sebagai arti yang penuh dalam konsep teori diskursus (Hardiman, 2009).

Teori diskursus atau demokrasi deliberatif dimaknai sebagai diskursus praktis, fromasi opini, dan aspirasi politis, yang di dalamnya ada proseduralisme atau kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Dalam artian, bahwa teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warganegara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu (Gastil & Black, 2007).

Warga negara di sini adalah berkesempatan untuk melakukan diskursus publik dalam konteks pengambilan keputusan, dan keputusan kebijakan harus berdasarkan kesepakatan publik, lewat hasil diskursus tersebut. Dengan paham ini, deliberasi merupakan proses pengambilan keputusan yang buat secara bersama dalam bentuk musyawarah dan dengan penuh pertimbangan. Dalam konteks demokrasi, demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik (Fadli, 2019).

Model demokrasi deliberatif meminati persoalan kesahihan keputusan-keputusan kolektif itu. Menurut Budi Hardiman (2009) model ini berupaya menjelaskan arti kontrol demokrasi melalui opini publik. Opini-opini publik dapat menjadikan opini-opini mayoritas yang mengklaim legitimasi mereka. Opini-opini itu adalah sesuatu yang logis dan koheren yang sah secara universal dan rasional. Namun, tidak semua opini-opini mayoritas diidentik dengan opini-opini yang benar. Karena itu, model demokrasi deliberatif bertugas memastikan opini-opini mayoritas agar terbentuk dengan baik, sehingga warga negara mengakui dan mematuhi opini-opini itu (Cuchumbé Holguín, 2010).

Poin yang ditekankan di sini adalah dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup, tetapi masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam setiap kebijakan politik dan hukum. Dalam demokrasi deliberatif, Habermas menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan dan sintesis, dan secara bersama-sama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat dan tidak doktriner (Muthhar, 2016). Hal ini bermaksud agar antara masyarakat dan negara tidak terjadi dialektika-diskursus yang intensif sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama dan tidak sepihak. Karena pada dasarnya Habermas menghendaki demokrasi yang berorientasi pada kualitas dan bukan sekedar kuantitas (Muttaqien et al., 2023).

Demokrasi deliberatif merupakan suatu dialog antar mekanisme sosial, seperti dalam negara antara legislatif-eksekutif-yudikatif, antar masyarakat dan pemimpinnya. Dalam demokrasi deliberatif, yang menjadi penekannya adalah dialog yang terbuka antara warga negara dalam pengambilan setiap keputusan. Asas-asas kemanusiaan dan kebebasan berpendapat menjadi kunci penentuan kebijakan dalam demokrasi. Oleh karena itu, Habermas mengkritik model demokrasi perwakilan karena di dalamnya, keterlibatan publik menjadi terbatas dan hampir tidak ada (Muttaqien et al., 2023).

### **Apa itu Ruang Publik?**

Jürgen Habermas merumuskan apa itu “*public sphere*” atau “ruang publik” dan unsur-unsur yang terkait adalah:

*Dengan ruang publik kami maksudkan pertama-tama suatu wilayah kehidupan sosial kita di mana apa yang disebut sebagai opini publik terbentuk. Akses kepada ruang publik terbuka bagi semua warganegara. Sebagian di ruang publik terbentuk dalam setiap pembicaraan di mana pribadi-pribadi berkumpul untuk membentuk suatu ‘publik’. Bila publik menjadi besar, komunikasi ini menuntut suatu sarana untuk deseminasi dan pengaruh; zaman sekarang surat kabar dan majalah, radio, dan televisi menjadi ruang publik (Habermas, 1989)*

Berdasarkan definisi tersebut ada tiga unsur yang dapat kita petik, yakni: media, pembicaraan, dan opini publik, dan ketiganya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ruang publik yang dimaksud adalah suatu ruang fisik, tetapi sesuatu ruang sosial yang diproduksi oleh tindakan komunikatif. Ruang publik juga bukan suatu institusi atau organisasi politik, tetapi suatu ruang tempat warganegara terlibat dalam deliberasi dialogal mengenai isu publik (Sastepredja, 2010). Poin yang ditekankan adalah semakin ruang publik itu terbuka, membuktikan terbentuknya perserikatan yang bebas dan pertukaran gagasan, semakin besar pula kemampuan mendukung demokratisasi masyarakat. Suatu bentuk pertukaran ide yang demokratis ditandai oleh debat terbuka, alternatif, kepercayaan, mutualitas (Sastepredja, 2010). Semuanya itu merupakan kondisi bagi kebebasan komunitas. Dalam ranah publik terbentuk kewarganegaraan dan *sens of belonging* yang mengatasi lingkup keluarga dan hubungan lokal. Di sinilah nilai-nilai universal dapat dikembangkan.

Habermas memahami ruang publik politisi itu sebagai prosedur komunikasi. Ruang publik itu memungkinkan para warganegara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik itu menciptakan kekuatan argumen. Ruang publik politisi

itu sebagai kondisi-kondisi komunikasi, dan bukan institusi dan juga bukan organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan-aturan yang mengikat. Dari konsep ini, dapat diartikan bahwa ruang publik berarti “keadaan dapat diakses oleh semua orang” yang ruangnya terbuka dan inklusif (Hardiman, 2009).

Dalam konteks zaman sekarang, politik dimediasikan oleh media masa, pers, media elektronik dan komputer. Ini semua membawa dunia publik ke rumah-rumah “*domestication of public sphere*”. Terjadi pergeseran keseimbangan antara ruang publik ke ruang privat. Media komunikasi menjadi “media dialog”. Televisi dan pemirsanya adalah partisipan dari pembicaraan yang berlangsung terus. Surat kabar merangsang pembicaraan; pembicaraan membentuk opini; opini membentuk aksi. Menurut Habermas, kelompok orang menjadi suatu publik sesudah mereka menggunakan rasionya dan dialog sendiri merupakan suatu proses “menggunakan rasio”(Sastepredja, 2010).

Menurut Habermas, persoalan utama adalah manakala institusi komunikasi massa menjadi komersial dan isinya di “personal” kan dan disensasionalkan. Pembaca diperlakukan sebagai konsumen atau pelanggan. Digunakan teknik baru “manajemen opini” (Sastepredja, 2010). Media masa menjadikan politik panggung sandiwara yang mengeksklusifkan massa rakyat dari diskusi publik. Penyingkiran individu untuk ambil bagian dalam pembicaraan ruang publik mempertegas pemisahan ruang publik dan ruang privat. Budaya komersial dikonsumsi secara privat, tak membutuhkan perdebatan atau diskusi lebih lanjut. Inilah malapetaka besar dalam ruang publik, jika sarana-sarana itu menjadi bahan komersial yang tak memiliki substansial (Kadarsih, 2008).

### **Problematika Ideologi di Ruang Publik Digital**

Ideologi ruang publik Habermas merupakan konsep tentang arena ideal tempat warga negara berinteraksi secara bebas dan rasional untuk membentuk opini publik melalui diskursus kritis, terbebas dari kekuasaan negara atau pasar, demi mencapai tujuan bersama dengan peran media sebagai fasilitator. Dalam hal demokrasi modern, ruang publik sangat penting dan menjadi sentral demokrasi. Itulah mengapa Habermas dalam karya lebih menghubungkan ruang publik dengan demokrasi. Dalam demokrasi, ruang publik merupakan tempat di mana demokrasi menjadi hid (Wahyudi et al., 2023).

Oleh karena itu, diskursus tentang ruang publik hendaknya tidak dipahami sebagai ruang yang kedap dari pengaruh ruang-ruang lain yang ada dalam masyarakat termasuk negara. Ruang publik adalah tempat persamaan persepsi dimungkinkan. Dalam demokrasi deliberatif, ruang publik adalah tempat di mana semua persepsi dan pandangan dari setiap warga negara disatukan dan dipertimbangkan secara bersama

untuk menghasilkan suatu keputusan. Karena pada dasarnya, demokrasi tanpa ruang publik adalah demokrasi yang mati (Prasetyo, 2012).

Diskursus tentang ideologi di ruang publik digital merupakan salah satu hal penting dalam demokrasi modern. Hal penting karena dinamika demokrasi modern sangat bergantung pada kualitas diskursus publik dalam ruang digital. Akan tetapi, dalam demokrasi modern, diskursus tentang ideologi di ruang publik digital mengalami kendala yang memungkinkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.

### **Polarisasi dan *Echo Chamber***

Salah satu problem utama dalam ruang publik digital adalah polarisasi ideologi. Dalam perspektif kritis, ideologi tidak hanya dipahami sebagai sistem gagasan politik, tetapi juga sebagai mekanisme yang menormalisasi relasi kuasa tertentu. Di ruang publik digital, ideologi bekerja melalui struktur komunikasi yang tampak netral dan alami. Algoritma, fitur personalisasi, dan budaya partisipasi daring membentuk cara individu menerima dan memproduksi wacana (Armanda et al., 2025).

Kondisi ini memungkinkan ruang publik digital tidak sepenuhnya bebas dari dominasi. Dalam ruang digital, polarisasi ditandai oleh pembelahan tajam antara kelompok-kelompok ideologis yang saling bersebrangan. Media sosial mendorong ekspresi sikap yang ekstrem karena konten yang provokatif dan emosional cenderung memperoleh perhatian lebih besar. Akibatnya, diskursus publik bergeser dari pertukaran argumen menjadi konfrontasi simbolik. Dalam kerangka Habermas, polarisasi mencerminkan kegagalan rasionalitas komunikatif. Komunikasi tidak lagi diarahkan pada pencapaian pemahaman bersama, melainkan pada penguatan posisi kelompok. Identitas ideologis menjadi lebih dominan dari pada pertimbangan argumentatif (Lim, 2017).

*Echo chamber* merupakan konsekuensi dari algoritma media sosial yang dengannya memperkuat pandangan pengguna dan mengurangi paparan terhadap perspektif berbeda (Cinelli et al., 2021). Kondisi ini melemahkan dialog lintas ideologis yang menjadi prasyarat deliberasi demokratis. Hal ini terjadi karena fenomena *echo chamber* masyarakat cenderung terpapar pada hal-hal yang diyakini dan disukai, sedangkan pandangan yang berbeda tidak muncul lagi di hadapannya. Fenomena ini mengakibatkan ruang digital masyarakat menjadi sempit dan homogen (Edfa, 2025). Dalam hubungannya dengan demokrasi deliberatif, *echo chamber* menjadi salah satu problem dinamika demokrasi di ruang publik digital.

## **Emosionalisasi Diskursus Politik**

Dalam diskursus politik digital, emosi kolektif sering kali mendominasi. Ideologi sering kali digunakan untuk memobilisasi emosi seperti kemarahan dan ketakutan, sehingga rasionalitas argumentatif semakin terpinggirkan. Hal ini terjadi karena dalam ruang publik digital tidak ada semacam kontrol untuk membatasi publik dalam menyajikan informasi. Selain itu, ruang publik digital juga disisi oleh aktor-aktor non-negara yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini, menyebarkan informasi, bahkan memoderasi narasi. Dalam ruang digital, karakter partisipatoris dan horizontal dari media baru memberikan peluang ekspresi yang lebih luas dibandingkan dengan media tradisional (Fatimah, 2025).

Dalam hubungannya dengan demokrasi deliberatif, fenomena di atas menjadi tantangan karena ruang publik digital cenderung menciptakan ekosistem komunikasi yang bersifat *personalized*, memperkuat filter bubbles serta menurunkan deliberatif publik yang menjadi inti dari demokrasi deliberatif (Fatimah, 2025). Selain itu, pembentukan dengan pandangan, nilai, atau kepentingan yang sangat berlawanan dalam ruang digital menjadi medium untuk menciptakan ketegangan sosial dalam masyarakat (Efriani, 2025).

Dalam masyarakat modern, ketergantungan informasi pada ruang digital sangat sehingga. Dengan ketergantungan ini, setiap informasi yang disajikan selalu dianggap benar tanpa pertimbangan kritis. Hal ini terjadi karena ketergantungan akan informasi dalam ruang digital telah mengerogoti emosi masyarakat yang tak sabaran dalam memahami dan menanggapi informasi.

## **Disinformasi dan Manipulasi Ideologi**

Perkembangan teknologi digital sangat mempengaruhi demokrasi. Dalam ruang digital, disinformasi merupakan suatu hal yang marak terjadi. Dalam demokrasi, disinformasi politik merusak basis epistemik deliberasi publik. Informasi palsu yang dibingkai secara ideologis sulit dibedakan dari fakta, sehingga masyarakat kehilangan landasan bersama untuk berdiskusi secara rasional (Allcott & Gentzkow, 2017).

Dalam ruang digital, disinformasi berfungsi sebagai strategi komunikasi strategi komunikasi yang efektif untuk menyuntikkan gagasan atau narasi tertentu ke dalam kesadaran publik. Informasi palsu dirancang khusus untuk memvalidasi atau mempromosikan ideologi tertentu, sambil merusak atau mendiskreditkan ideologi saingannya. Dalam hal ini, isu-isu yang berkaitan dengan ideologi sering menjadi target utama di pasar disinformasi karena cenderung emosional dan memicu polarisasi (Juniasari et al., 2025)

## **Implikasi Terhadap Demokrasi Deliberatif Digital**

Demokrasi deliberatif menekankan diskursus rasional, inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam ruang digital, problematika di ruang publik digital berdampak pada demokrasi deliberatif digital dan menimbulkan beberapa implikasi seperti; (1) menurunnya kualitas deliberasi. Hal ini terjadi karena diskursus digital didominasi oleh, serangan personal, simplikasi isu kompleks dan narasi emosional dan viral. Beberapa hal ini bertentangan dengan prinsip deliberasi yang menuntut refleksi dan pertimbangan rasional. (2) Erosi kepercayaan publik. Polarisasi ideologi dan disinformasi melemahkan kepercayaan pada institusi demokrasi, kepercayaan antarwarga negara dan deliberasi kehilangan fondasi normatifnya. (3) Eksklusi dan Silent Majority. Kelompok minoritas, moderat, atau warga negara yang tidak vokal sering tersingkir oleh dominasi ideologi yang agresif. Hal ini berakibat pada partisipasi publik menjadi tidak setara dan ruang publik digital tidak benar-benar setara (Lim, 2017)

## **Upaya Penguatan Demokrasi Deliberatif Digital**

Untuk memperkuat demokrasi deliberatif digital, ada beberapa upaya konkrit, (1) Pengembangan platform digital. Membangun platform khusus untuk memfasilitasi dialog antar pemerintah, akademisi dan masyarakat secara teratur. Selain itu pentingnya memanfaatkan teknologi untuk menciptakan ruang temu daring yang inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari daerah perdesaan. (2) Peningkatan literasi dan tanggung jawab digital. Sebagai upaya penguatan demokrasi deliberatif digital adalah penting meningkatkan pelaksanaan literasi digital secara masif untuk membangun pemikiran kritis dan ketahanan terhadap disinformasi. Dan juga mendidik masyarakat untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. (3) Peran Media dan Akademisi. Mendorong media untuk mengedepankan jurnalisme deliberatif yang fokus pada substansi isu, bukan sensasi. Memanfaatkan kapasitas akademisi untuk menyediakan data dan analisis yang memperkaya diskusi publik. (4) Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah. Menerapkan inisiatif data terbuka (Open Data) agar informasi publik mudah diakses warga, mendorong pengawasan kritis terhadap kinerja pemerintah. Mengintegrasikan partisipasi warga secara digital dalam proses pengambilan kebijakan agar lebih transparan dan akuntabel (Team, 2025)

## KESIMPULAN

Ideologi di ruang publik digital memainkan peran sentral dalam membentuk dinamika demokrasi kontemporer. Alih-alih menjadi arena deliberasi rasional yang inklusif, ruang publik digital kerap terfragmentasi oleh polarisasi ideologis, dominasi politik identitas, dan penyebaran disinformasi yang melemahkan kualitas diskursus publik. Kondisi ini menghambat prinsip-prinsip utama demokrasi deliberatif, seperti pertukaran argumen berbasis rasionalitas, kesetaraan partisipasi, dan orientasi pada kepentingan bersama.

Namun demikian, ruang publik digital tidak sepenuhnya bersifat destruktif bagi demokrasi deliberatif. Dengan dukungan literasi digital dan ideologis, desain platform yang mendorong dialog lintas pandangan, serta penguatan etika diskursus publik, ruang digital tetap memiliki potensi menjadi wahana deliberasi demokratis yang lebih luas dan partisipatif. Oleh karena itu, tantangan utama demokrasi deliberatif digital bukanlah keberadaan ideologi itu sendiri, melainkan bagaimana ideologi dikelola agar tidak menjadi sumber eksklusi dan konflik, melainkan sarana refleksi kritis dan pembentukan kehendak publik yang demokratis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis patut mengucapkan terima kasih khusus kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, secara khusus kepada pihak perpustakaan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero yang telah menyediakan buku-buku dan jurnal-jurnal cetak yang dapat diakses secara langsung oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Amri, Y., & Yandri, L. I. (2025). Algoritma media sosial dan polarisasi: penguatan echo chamber dan dampaknya terhadap kualitas deliberasi publik. *Jurnal Sosial Dan Politik*, 2(1), 1–12.
- Armanda, D. M., Afaf, D., & Krisdahyanto, R. (2025). Filter bubble dan echo chamber: Pengaruh algoritma media sosial terhadap pola konsumsi informasi mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4), 1124–1129. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.266>

- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(9), e2023301118.
- Cuchumbé Holguín, N. J. (2010). Deliberative democracy: public opinion and political will. *Estudios de Filosofía*, 42, 87–101.
- Dahlberg, L. (2001). Exploring the prospects of online deliberative forums extending the public sphere. *Information, Communication & Society*, 4(4), 615–633. <https://doi.org/10.1080/13691180110097025>
- Edfa, N. L. (2025). *Fenomena echo chamber di era digital*. Princeton University Press. <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691175515>
- Efriani, Y. (2025). Polarisasi politik Indonesia tahun 2024 dalam pemberitaan media online. *Jurnal Harmoni*, 3(1), 76. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i1.4869>
- Fadli, M. R. (2019). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: Tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Jurnal Cakrawala*, 19(1), 76–78. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>
- Gastil, J., & Black, L. (2007). Public deliberation as the organizing principle of political communication research. *Journal of Deliberative Democracy*, 4(1). <https://doi.org/10.16997/jdd.59>
- Gimmler, A. (2001). Deliberative democracy, the public sphere and the Internet. *Philosophy & Social Criticism*, 27(4), 21–39. <https://doi.org/10.1177/019145370102700402>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contribution to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Haliim, W. (2018). Demokrasi deliberatif Indonesia: Konsep partisipasi masyarakat dalam membentuk demokrasi dan hukum yang responsif. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 42(1).
- Hardiman, B. F. (2009). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Juniasari, A., Suryasuci Ramdhan, A., Putri, A., Yohana, E., & Wiguna, E. (2025). Propaganda dan ideologi dalam iklan politik di media sosial. *Jurnal Hukum Dan*

- Sosial Politik*, 3(3), 3–6. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i3.5152>
- Kadarsih, R. (2008). Demokrasi dalam ruang publik: Sebuah pemikiran ulang untuk media massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah*, 9(1).
- Lewar, P. P., & Madung, O. G. N. (2022). [Judul artikel]. *Jurnal Ledalero*. <https://ejournal.iftkledalero.ac.id/index.php/JLe/article/view/315>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.
- Muthhar, A. M. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180>
- Muttaqien, M. E., Deden, & Ramdam. (2023). Konsep komunikasi Jürgen Habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif. *Jurnal Unpas*, 6(1), 55.
- Nino, M. (2024). Demokrasi deliberatif Jürgen Habermas dan relevansinya bagi demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero*, 23(2), 12. <https://doi.org/10.31385/jakad.v23i2.27>
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi rasional: Melacak pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(2), 170–171. <https://doi.org/10.22146/jsp.10901>
- Sastepredja, S. (2010). *Ruang publik dan ruang privat dalam tinjauan kebudayaan BT - Ruang publik: Melacak “Partisipasi demokrasi” dari polis sampai cyberspace*. Kanisius.
- Team, E. (2025). *Era baru demokrasi: Bagaimana teknologi mengubah partisipasi politik global transformasi demokrasi digital*. <https://www.at-grc.com/post/era-baru-demokrasi-bagaimana-teknologi-mengubah-partisipasi-politik-globaltransformasi-demokrasi>
- Wahyudi, R. F., Musliadi, M., & Faridah. (2023). Ruang publik, media sosial, demokrasi, dan pendekatan kritis. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.47435/retorika.v6i2.3140>